



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAJAMUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 625712

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.675.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/80 m² di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 95000 m² di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 36000 m² di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.800.000
4. Tanah Seluas 10000 m² di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 500 m² di KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 30000 m² di LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 3.000.000.000
7. Tanah Seluas 400 m² di LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 450.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/120 m² di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.930.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.715.730.000
III. HUTANG	Rp.	498.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.217.730.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

